

## Anggaran Banjir DKI Dinilai belum Tepat Guna

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai tidak mengoptimalkan anggaran dalam menanggulangi banjir Jakarta. Penggunaan anggaran penanggulangan banjir masih belum tepat sasaran. "Poin itu yang terlewatkan. Jadinya, anggaran kita besar tapi tidak berdampak," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani lewat keterangan tertulis, Minggu (27/12).

Zita mencontohkan penggunaan anggaran penanggulangan banjir dengan pengadaan Flood Information System (sistem informasi banjir). Pengadaan alat itu disebut penting namun, tidak perlu alat baru.

"Optimalkan saja eksistensinya. Kalau apa-apa pengadaan terus tapi tidak optimal, hasilnya sama saja, boros anggaran," ujar Zita. Contoh lainnya, pembangunan drainase vertikal yang memakan anggaran mencapai Rp817 miliar.

Menurut Zita, pembangunan tersebut tidak memerlukan gelontoran dana apa

pun. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan, pemilik bangunan yang menutup tanah atau pemohon pengguna air tanah wajib membuat sumur resapan. Sehingga, anggaran penanggulangan banjir sebesar Rp817 miliar itu dapat digunakan untuk kepentingan lainnya.

"Itu baru dua contoh, masih banyak lagi anggaran yang kurang tepat. Itulah mengapa kami menekankan yang paling awal itu adalah komitmen. Janji yang diucapkan, itu belum tentu komitmen," tegas politikus PAN itu.

Menurut dia, komitmen harus berbentuk nyata. Komitmen harus dituangkan secara tertulis dan diimplementasikan secara serius, menyeluruh, dan berkelanjutan. "Makanya harus masuk dalam RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) atau dalam bentuk lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang. Agar yang mengucap janji ingat, yang menyaksikan juga ingat," kata Zita. ● osm

## Kasus Mesum di RSD Wisma Atlet, Manajemen Benahi Pengawasan

JAKARTA (IM) - Kodam Jaya, selaku Komando Tugas Gabungan Terpadu dan Satgas PDMMPK Covid-19, pelaksanaan operasional Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet, membenarkan terjadinya tindakan asusila sesama jenis antara oknum tenaga kesehatan dengan pasien covid-19.

Kapendam Jaya, Letnan Kolonel Arh Herwin BS menyebut keduanya telah ditangkap. Namun, keduanya akan menjalani tes PCR terlebih dahulu sebelum diserahkan ke pihak berwajib untuk diambil langkah hukum.

Herwin mengaku menyalakan perbuatan kedua pelaku. Sebab, dampak dari perbuatan tersebut berisiko terhadap penularan virus korona kepada tenaga kesehatan lainnya. Karena kejadian ini, manajemen RSD Wisma Atlet akan membenahi pengawasan kepada para penghuni Wisma Atlet agar kejadian serupa

tidak terulang.

Manajemen juga mengklaim akan meningkatkan standar prosedur operasional RSD Wisma Atlet dan memonitor pelaksanaan pelayanan kesehatan.

"Kami juga akan mengevaluasi proses rekrutmen relawan medis sebagai bentuk antisipasi," imbuh Herwin, dikutip dalam keterangan resmi, Minggu (27/12).

Sebelumnya, viral kasus mesum oleh pelaku LGBT antara pasien covid-19 yang diisolasi di Wisma Atlet dengan salah satu tenaga kesehatan yang bertugas.

Kabar perihal pasien dan perawat yang melakukan kegiatan mesum sesama jenis di salah satu tower di Wisma Atlet pertama kali viral di media sosial twitter.

Hal ini diketahui dari tangkapan layar percakapan via aplikasi bertukar pesan, Whatsapp antara pasien dan perawat tersebut. ● ber



IDN/ANTARA

### JASA CUCI SEPEDA

Pegawai mencuci sepeda konsumen di Bike 2 Wash Mayestik, Jakarta Selatan, Minggu (27/12). Jasa cuci sepeda dengan harga Rp60 ribu hingga 70 ribu tergantung jenis sepeda tersebut setiap harinya mampu mencuci sekitar 15-30 sepeda dan menjadi salah satu prospek bisnis ditengah merebaknya penggiat sepeda selama pandemi di Ibu Kota.

## DPRD Dorong Apartemen Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik meminta sejumlah pihak untuk saling bekerja sama dalam menanggulangi kasus Covid-19 yang saat ini terus mengalami lonjakan. Salah satu pihak yang diminta untuk ikut berkontribusi, menurut Taufik adalah para pengembang apartemen.

Taufik mendorong para pengembang di Jakarta meminjamkan apartemen untuk dijadikan tempat isolasi mandiri bagi pasien Covid-19. Hal itu akan sangat membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengingat semakin menipisnya ketersediaan ruang isolasi bagi pasien Covid-19 saat ini.

"Saya berharap pengembang di Jakarta yang masih memiliki apartemen belum terjual saya kira dengan sukarela harusnya menyerahkan atau meminjamkan apartemen itu untuk kepentingan perawatan yang terkena Covid-19 di Jakarta," ujar Taufik, Minggu (27/12).

Taufik mengungkapkan, menurutnya penanganan Covid-19 merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dengan pemerintah. Oleh sebab itu, segala upaya yang memungkinkan dalam penanganan Covid-19 perlu untuk dilakukan, termasuk oleh para pengembang.

"Covid ini tanggung jawab

kita bersama, para pengembang yang memiliki apartemen di Jakarta untuk dapat membantu Pemda meminjamkan apartemen itu menjadi tempat-tempat perawatan orang, masyarakat kita yang kena Covid-19," ungkapnya.

Upaya itu dinilai lebih mudah dilakukan dibandingkan, misalnya dengan memanfaatkan GOR yang dinilai membutuhkan waktu lebih banyak untuk membuat sekat-sekat ruang yang diperuntukkan untuk isolasi mandiri. "Saya kira apartemen-apartemen itu sudah jadi ruang-ruang, ruang itulah yang kita pakai," terangnya.

Taufik melanjutkan, Pemprov DKI Jakarta harus terus melakukan berbagai upaya dalam menghadapi kondisi pandemi Covid-19. Pasalnya, beberapa waktu belakangan angka kasus Covid-19 di Ibu Kota mengalami peningkatan yang pesat, yakni sekitar 1.500 hingga 2.000 kasus.

"Kalau ini kejadian terus berlangsung, saya yakin sarana untuk melakukan perawatan terhadap pasien Covid-19 itu tidak memadai," tuturnya.

Dengan adanya kolaborasi dari Pemprov DKI Jakarta dan para pengembang di Jakarta seperti itu, Taufik berharap kasus Covid-19 di Jakarta dapat ditekan serta dapat bisa lebih tertangani dengan baik. ● osm

# 4 | Metropolis

IDN/ANTARA



### PEMASANGAN BALOK GIRDER TOL BECAKAYU SEKSI II A

Sejumlah pekerja menyelesaikan pemasangan balok girder (erection girder) Tol Becakayu Seksi II A di Jalan Ahmad Yani, Bekasi, Minggu (27/12) dini hari. Pemasangan balok girder proyek jalan Tol Becakayu (Bekasi, Cawang, Kampung Melayu) seksi II A sepanjang 4,1 km dari Jakasampurna menuju Bekasi Timur tersebut dilaksanakan dari tanggal 18 Desember-8 Januari 2020 pukul 23.00 - 04.00 WIB dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan pengguna jalan.

## Pemprov DKI Pertimbangkan Tarik 'Rem Darurat' di Awal 2021

Pemprov DKI terus memperhatikan dan mencermati data-data perkembangan kasus Covid-19 serta penanganannya.

"Kita akan lihat beberapa hari ke depan setelah tanggal 3 Januari 2021, apakah dimungkinkan Pak Gubernur, nanti akan ada emergency brake," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mempertimbangkan akan menarik rem darurat atau emergency brake policy dengan memperketat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada awal tahun 2021. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan penyebaran kasus Covid-19 dan penambahan kasus baru Covid-19 yang terus melonjak dalam beberapa hari belakangan ini.

"Dalam menyikapi peningkatan kasus Covid-19 ini, kami akan terus mengambil berbagai kebijakan. Kita akan

lihat beberapa hari ke depan setelah tanggal 3 Januari 2021, apakah dimungkinkan nanti Pak Gubernur, nanti akan ada emergency brake," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (27/12).

Pemprov DKI, kata dia, terus memperhatikan dan mencermati data-data perkembangan kasus Covid-19 serta penanganannya. Pasalnya, keputusan menarik rem darurat atau memperketat PSBB sangat tergantung pada data dan fakta yang terjadi di tengah

masyarakat.

"Jadi, nanti kita akan lihat sesuai dengan fakta dan data (perkembangan kasus Covid-19), memang ini sangat dinamis sekali terkait fakta dan data," tandas dia.

Karena itu, Ariza meminta masyarakat dan pelaku usaha untuk bersama-sama disiplin menjalankan protokol kesehatan agar bisa mengendalikan penyebaran Covid-19. Pasalnya, keberhasilan pengendalian Covid-19 sangat tergantung 80% pada disiplin masyarakat dan hanya 20% pada intervensi pemerintah melalui berbagai kebijakan dan penegakan hukum atas kebijakan yang dibuat.

"Kami minta khusus pelaku usaha, perkantoran dan lainnya untuk membantu kita semua agar jangan sampai nanti ada peningkatan luar biasa sehingga kami Pemprov dengan jajaran, Pak Gubernur terpaksa mengambil kebijakan untuk memperketat PSBB, semua berpulang pada kita semua. Mari kita pastikan bah-

wa semua patuh, taat melaksanakan protokol kesehatan," ungkap dia.

Pemprov DKI Jakarta, kata Ariza telah melakukan berbagai langkah untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid-19. Mulai dari menerbitkan berbagai regulasi, melakukan sosialisasi dan edukasi serta melakukan penindakan dan penegakan hukum dengan memberikan sanksi kepada masyarakat dan pelaku usaha yang melanggar aturan PSBB.

Terakhir, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Intruksi Gubernur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengendalian dan Seruan Gubernur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kegiatan Masyarakat dalam Pencegahan Covid-19 pada Masa Libur Hari Raya Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021.

Ingub dan Sergub ini diter-

bitkan dalam rangka mengendalikan mobilitas serta kegiatan masyarakat, sekaligus langkah antisipasi munculnya kluster liburan jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal serta Tahun Baru 2021.

Pemprov DKI, kata Ariza, juga terus mengingatkan masyarakat agar tidak bepergian ke luar rumah selama liburan panjang akhir tahun terlebih warga yang berusia di atas 60 tahun dan di bawah 9 tahun kecuali untuk urusan yang sangat penting.

"Karena di liburan ini potensi orang yang keluar rumah meningkat, potensi interaksi meningkat potensi kerumunan meningkat, itu artinya potensi penularan juga akan meningkat. Jadi tempat yang terbaik sering disampaikan Pak Gubernur adalah tetap berada di rumah. Jadi kami minta yang ada di rumah tetap menikmati kebersamaan dengan keluarga," pungkas Ariza. ● pp

## Anies Dinilai tidak Peka dengan Masyarakat Bawah

JAKARTA (IM) - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Pemprov DKI Jakarta baru-baru ini menerima penghargaan TOP Digital Awards 2020. Namun, DPRD DKI melihat penghargaan seperti itu tidak dirasakan kebanyakan warga Jakarta, terutama masyarakat kelas bawah.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI-P, Gilbert Simanjuntak meminta Anies kembali memperhatikan janji-janji kampanyenya untuk warga Jakarta. "Masalah lain adalah bagaimana Pemprov DKI mewujudkan janji kampanye. Pencapaian Digital adalah sisi yang kurang dirasakan masyarakat dan bukan janji kampanye," kata Gilbert, Minggu (27/12).

Gilbert merinci lebih detail, sektor yang dibutuhkan masyarakat Jakarta, misalnya UMKM yang minim sentuhan, juga sektor informal yang hampir tanpa sentuhan. Menurutnya, hal itu tidak membutuhkan sistem digital. Melainkan perlu ada kebijakan anggaran dan program.

"Saat ini, hampir semua kebijakan anggaran dan pro-

gram UMKM di DKI adalah dari APBN (Pemerintah Pusat), minim sekali yang berasal dari APBD (Pemprov DKI). Percuma sistem digital dibangun kalau tidak ada kebijakan yang prorakyat," kritiknya. Beberapa contoh lain kegagalan pencapaian adalah minimnya pencapaian rumah DP 0%. Ia mencatat hanya 780 rumah DP 0% yang terbangun dari target 300.000 dengan sisa waktu hingga 2022. Pemprov DKI malah akan membangun perumahan di Kampung Akurium dengan jumlah terbatas, sementara rumah sewa yang ada belum diisi. Padahal, struktur tanah di Kampung Akurium tidak layak untuk gedung tinggi.

"Masalah banjir yang tidak terurai dan masih sebatas retorika tanpa kinerja, masalah sampah, masalah LRT yang disertai penjelasan Dinas Perhubungan yang menclence, Jaklingko yang belum jalan, dan beragam masalah lainnya yang tidak butuh sistem digital tapi kebijakan. Masalah baru ketiadaan lahan pemakaman untuk jenazah covid-19 juga tidak butuh sistem digital, tapi eksekusi," paparnya. ● han

## DPRD Minta Anies Tambah Tenaga Medis

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak hanya menambah kapasitas ruang isolasi bagi pasien Covid-19, namun juga menambah jumlah tenaga medis sebanyak 2.000 orang. Hal itu karena jumlah pasien Covid-19 yang terus meningkat, tidak sebanding dengan jumlah tenaga medis.

"Begitu ada penambahan ruang tempat tidur, penambahan pasien, saya kira harusnya tenaga medis bertambah. Saya minta Pemda DKI sesegera mungkin untuk memproses penerimaan 2.000 tenaga medis," katanya, Minggu (27/12).

Taufik mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta berencana menambah kapasitas ruang isolasi bagi pasien karena jumlah kasus Covid-19 terus mengalami peningkatan. Untuk itu, menurutnya ketersediaan tenaga medis untuk menangani pasien sama pentingnya dengan menambah ruang isolasi.

"Jadi jangan sampai ruang tersedia, pasien sudah ada di ruangan, tapi yang mengurus, tenaga medisnya kurang. Saya

meminta Pemda DKI segera mempersiapkan tenaga medisnya, melihat perkembangan peningkatan yang terpapar," jelasnya.

### Hampir Penuh

Keterisian pasien di Rumah Sakit Darurat (RSD) Covid-19 Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat, hampir penuh. Bahkan, tingkat hunian di Tower 7 Wisma Atlet kini mencapai 90 persen dan tidak lagi menerima pasien. "Keterisian di Tower 7 sudah 90 persen hingga Minggu pagi (27/12). Kini tower ini sudah closed, tidak menerima pasien," kata Komandan Lapangan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran, Letkol Laut Muhammad Arifin saat dihubungi, Minggu (27/12).

Dia menyebutkan kapasitas pasien di Tower 6 juga kini terpenuhi di atas 70 persen, begitu juga di Tower 4 yang telah terisi 70 persen. Pihaknya mencatat hanya Tower 5 yang keterisiannya lebih sedikit yaitu sekitar 60 persen.

Banyaknya pasien membuat pihaknya telah mengarahkan pasien tanpa gejala ke Tower 8 Pademangan, Jakarta

Utara. Sementara Tower 4, 5, 6 dan 7 di Wisma Atlet saat ini hanya menerima pasien bergejala ringan hingga sedang. Arifin menambahkan, RSD Wisma Atlet telah menyiapkan Intermediate Care Unit (IMCU) sebagai langkah antisipasi meningkatnya kebutuhan perawatan bagi pasien positif Covid-19 dengan gejala sedang. "Rencananya IMCU sebanyak 50 bed di lantai 2 Tower 7," ujarnya.

Terus bertambahnya pasien bergejala yang masuk ke Wisma Atlet membuat pihaknya khawatir. Sebab, jika pasien yang masuk Wisma Atlet terus bertambah maka bisa saja semua Tower penuh. Apalagi, dia mengatakan, di akhir tahun banyak masyarakat yang menjalani tes swab, termasuk tes massal rapid antigen.

Ketika terkonfirmasi positif maka tidak menutup kemungkinan RSD Wisma Atlet penuh. Oleh karena itu, Arifin kembali mengimbau lebih baik di rumah selama libur akhir tahun. "Daripada tertular Covid-19 dan tidak kebagian rumah sakit (karena penuh). Nanti repot," katanya. ● ber



IDN/ANTARA

### PENATAAN STASIUN TEBET

Sejumlah anak bermain di area proyek penataan Stasiun Tebet, Jakarta, Minggu (27/12). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penataan kawasan Stasiun Tebet untuk mengoptimalkan integrasi antarmoda bagi penumpang yang mengakses transportasi kereta api.